

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur dkk. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 7, No. 2, Hal : 1080 – 1110. ISSN : 2302-8912.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2017-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Bupati Karangasem Provinsi Bali. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Bali : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Donaldson, Lex and James H.Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management.*
- Ernawati. 2019. Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Stikubank Semarang.
- Fatmawasti, Ade Pipit dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. Jurnal Akuntansi Tahun XII No. 02. ISSN : 1979-8334.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi Keuangan Daerah” Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Humas Jateng. (2017, Juni 09). Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : Realisasi Pendapatan Daerah Jateng Meningkatkan 16,7%. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/realisasi-pendapatan-daerah-jateng-meningkat-167/>.
- Humas Jateng. (2018, Juni 21). Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 2017, Pendapatan Pemprov Jateng Naik Rp 4 T. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/2017-pendapatan-pemprov-jateng-naik-rp-4-t/#:~:text=Semarang%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah,naik%20menjadi%20Rp%2023%2C703%20triliun.>
- Humas Jateng. (2019, Agustus 21). Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ganjar : PAD Jateng 2019 lebih Target Rp 289 M. Diakses dari [https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-pad-jateng-2019-lebih-target-rp289-m/#:~:text=SEMARANG%20%E2%80%93%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD,miliar%20dari%20target%20murni%202019.](https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-pad-jateng-2019-lebih-target-rp289-m/#:~:text=SEMARANG%20%E2%80%93%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD,miliar%20dari%20target%20murni%202019.)
- Kusnandar, Viva Budy. 2019. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang Terbesar se-Provinsi Jawa Tengah (2018). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/pendapatan-asli-daerah-pemerintah-kota-semarang-terbesar-se-provinsi-jawa-tengah.>
- Luthfiana, Bilqis Amalia. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016-2017. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Stikubank Semarang.
- Machmud, Joice dan Lukfiah Irwan Radjak. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal of Accounting Science. Vol. 2, No.1. EISSN : 2548-3501.

- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV.ANDI OFFSET.
- Moh Mahsun, dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.
- Muhayanah, Fisa Aprilia. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulia Andirfa, dkk. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 5, No. 3, Hal 30-38. ISSN : 2302-0164.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Kompartemen. Vol. XV, No. 1.
- Nora Angelina, dkk. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018. Jurnal Baktera Inovasi. Vol.4, No.1. ISSN : 2613-9243.
- Prastiwi, Nanda Dipa dan Andri Waskita Aji. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Kajian Bisnis. Vol. 28, No. 1, Hal : 89 – 105.
- Pratiwi, Tri Yuni. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwasih. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas PGRI Yogyakarta.

Putri, Ni Kadek Novia Indrawati dan Ni Putu Ayu Darmayanti. 2019. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E – Jurnal Manajemen. Vol. 8, No.5, Hal : 2834 – 2861. ISSN : 2302-8912.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- Rizqi, Alif Nazzala. 2019. Jawa Tengah Genjot PAD Lima Kali Lipat, Bupati dan Walikota Dikawal KPK. Diakses dari <https://semarang.bisnis.com/read/20190222/535/892204/jawa-tengah-genjot-pad-lima-kali-lipat-bupati-dan-walikota-dikawal-kpk>.
- Sari, Indah Puspa. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. JOM Fekon. Vol. 3, No. 1.
- Sari, Ni Made Diah Permata dan I Ketut Mustanda. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E – Jurnal Manajemen. Vol. 8, No. 8, Hal : 4759 – 4787. ISSN : 2302-8912.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Warsito Kawedar, dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik “Pendekatan Pengangguran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah” Buku 1. Semarang : Widya Karya-Semarang.